

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia termasuk salah satu negara industri yang memiliki berbagai jenis sektor perusahaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) melalui websitenya terdapat berbagai macam sektor perusahaan yang di kategorikan berdasarkan kontribusi sektor terkait terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB), antara lain yakni sektor perikanan, pertanian, penggalian dan pertambangan, kehutanan, jasa kesehatan, sektor jasa pendidikan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, pengadaan listrik dan gas, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, industri pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan, sektor *real estate* dan properti, serta sektor konstruksi.

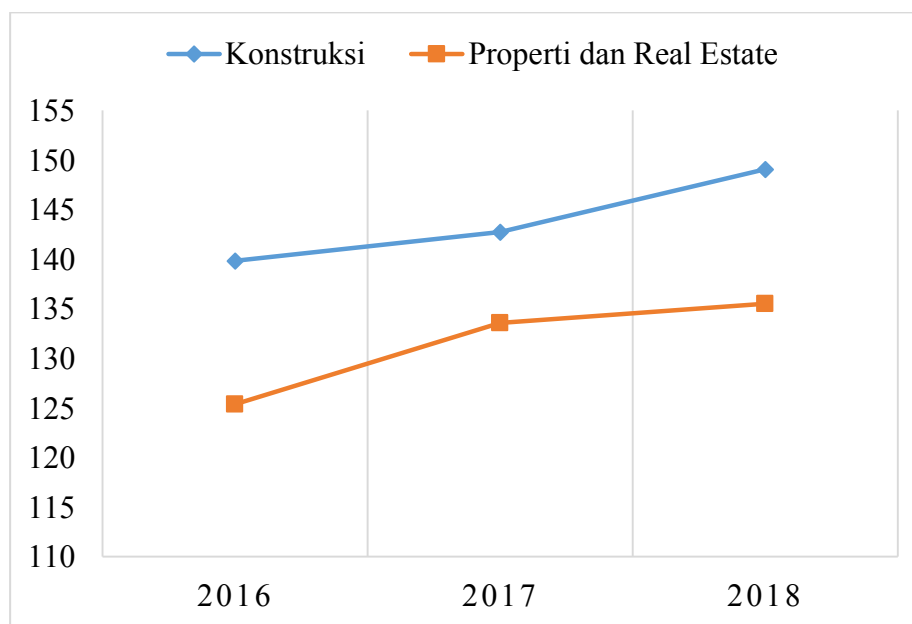
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perusahaan jasa konstruksi menyebutkan bahwa, perusahaan ini adalah suatu layanan jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi dalam rangka kontrak usaha yang dilakukan untuk membangun suatu bangunan sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan definisi tersebut menjelaskan bahwa sektor konstruksi memiliki dua kegiatan usaha, pertama terkait jasa konsultasi, dan kedua adalah pekerjaan konstruksi bangunan. Sektor konstruksi menurut Bursa Efek Indonesia (BEI), merupakan sub sektor dari sektor konstruksi, *real estate*, dan properti. Terdapat 18

perusahaan di dalamnya yang termasuk sebagai perusahaan sub sektor konstruksi yang ada di Indonesia saat ini.

Sub sektor konstruksi dalam perekonomian suatu negara memiliki peran strategis, karena memiliki keterkaitan dan *multiplier effect* yang tinggi (Emin Öcal et al., 2007). *Multiplier effect* adalah efek dalam ekonomi dimana suatu peningkatan atau penurunan pengeluaran nasional akan mempengaruhi konsumsi suatu daerah dalam tingkat nasional akan bertambah atau berkurang (Prananda Putra et al., 2017). Konsumsi di suatu negara akan penentuan besar kecilnya pendapatan secara domestik negara tersebut (Pidun et al., 2010).

Konsumsi masyarakat akan berdampak kepada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada suatu negara yang didalamnya terdapat kontribusi dari berbagai sektor perusahaan, salah satunya adalah sub sektor konstruksi. Maka dari itu, angka dari rasio *profit margin* perusahaan menjadi hal penting dalam meningkatkan PDB untuk mendorong peningkatan rasio tersebut. Hal tersebut juga menunjukkan, bahwa perusahaan konstruksi memiliki peranan penting dalam fluktuasi PDB di suatu negara. Berikut data kontribusi sub sektor konstruksi pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tahun 2016-2018:

**Tabel I.1**  
**Distribusi Sektor Konstruksi, dan Properti *Real Estate* ke PDB**  
**Menurut Lapangan Usaha (Seri 2010)**  
**Tahun 2016-2018**



Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (2020)

Berdasarkan grafik tersebut terjadi peningkatan angka kontribusi sektor konstruksi, dan sektor properti *real estate* yang setiap tahunnya, dari sub sektor konstruksi tahun 2016 memiliki angka 139,83 triliun, kemudian meningkat menjadi 142,78 triliun atau meningkat sebesar 2,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian meningkat lagi di tahun 2019 di angka 149,06 triliun atau sebesar atau meningkat sebesar 4,4% dari tahun 2018. Hal serupa terjadi dalam subsektor *real estate* dan properti yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, mulai dari tahun 2016 sebesar 125,4 triliun meningkat menjadi 133,6 triliun atau sebesar 8,2%. Kemudian meningkat kembali di tahun 2019 menjadi 135,5 triliun atau naik sebesar

1,4% dibandingkan tahun 2018. Persentase peningkatan tahun 2016 ke 2017 lebih besar subsektor *real estate* dan properti, tetapi tahun 2017 ke 2018 sub sektor konstruksi unggul dalam persentase.

Peningkatan kontribusi diatas diakibatkan karena beberapa hal, salah satunya tentang kenaikan tersebut diperkirakan terkait dengan peningkatan aktivitas proyek yang ada pada sektor konstruksi, peningkatan tersebut membuat perusahaan konstruksi lebih aktif dalam usahanya (Kementrian Perindustrian, 2018). Ketika, suatu perusahaan mendapatkan aktivitas operasional yang baik maka pendapatan usaha akan mengikuti peningkatan aktivitas tersebut. Terbukti, dalam dua perusahaan sub sektor konstruksi yang besar yang peneliti amati, seperti PT Adhi Karya (Persero), dan PT PP (Persero), komponen pendapatan usaha mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2017-2018 dalam laporan keuangan perusahaan.

Laporan keuangan menjadi sesuatu fundamental untuk perusahaan yang *go public*, sebab hal tersebut merupakan langkah awal perusahaan agar dapat melakukan *Initial Public Offering* (IPO). Peraturan ini dimuat oleh ketentuan yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan bahwa, perusahaan diharuskan mempersiapkan dokumen dan diantara dokumen tersebut terdapat laporan keuangan hasil yang sudah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2018 tentang penyampaian laporan lalui system pelaporan elektronik perusahaan publik atau emiten, pada pasal dua butir tiga c berisi tentang, kewajiban penyampaian keuangan

berkala emiten atau perusahaan publik. Istilah perusahaan publik digunakan untuk menyebut perusahaan yang termasuk dalam daftar Bursa Efek Indonesia (BEI), dan sahamnya dapat diperjual belikan dengan ketentuan yang berlaku. Investor ketika ingin membeli atau menjual saham akan memperhitungkan berbagai aspek, seperti kredibilitas perusahaan secara umum, laporan keuangan perusahaan, dsb.

Laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan menyatakan, bahwa laporan keuangan memiliki tujuan untuk menyajikan data-data yang berkaitan dengan kinerja, data posisi keuangan, serta berubahnya kondisi finansial perusahaan, data tersebut berguna sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Menurut Dwi Martani dalam presentasi PSAK Nomor 1, laporan keuangan yakni hasil dari rangkaian tahap akuntansi yang tertata berdasarkan kinerja dan posisi keuangan di perusahaan, serta bertujuan dalam menyampaikan hasil tersebut dalam konteks keuangan yang bermanfaat untuk pemakai laporan keuangan dan pembuat keputusan ekonomi. Komponen pada laporan keuangan menurut PSAK Nomor 1 antara lain, laporan penghasilan dalam periode tertentu, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan berubahnya modal dalam periode tertentu, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dan laporan komprehensif lain selama periode tertentu. Laporan keuangan tersebut berisi komponen-komponen yang meliputi laporan kegiatan operasional perusahaan yang sedang berjalan, dalam jangka yang panjang ataupun jangka yang pendek. Data-data berupa

angka yang dimuat di laporan keuangan bisa dimanfaatkan sebagai dasar penghitungan rasio keuangan pada suatu perusahaan termasuk perusahaan konstruksi.

*Gross Profit Margin (GPM)* adalah sebagian rasio dari rasio keuangan yang mengukur efektivitas dan efisiensi dari suatu perusahaan dengan membandingkan pendapatan dan laba kotor. *Gross Profit Margin (GPM)* pada sub sektor konstruksi adalah pengukuran yang relevan untuk mengukur terkait dengan kemampuan suatu perusahaan konstruksi dalam menghasilkan laba secara efisien Emin Öcal et al., (2007). Penelitian terkait dengan GPM pernah dilakukan oleh Njeri Muiruri (2016), dan belum banyak yang meneliti tentang GPM dengan unit analisis perusahaan konstruksi di Indonesia. Namun, ada penelitian yang diteliti oleh Emin Öcal et al., (2007) tentang *Gross Profit Margin (GPM)* yang dilakukan di Turki pada sektor perusahaan konstruksi.

Perusahaan yang mempunyai GPM tinggi akan menjadi lebih *profitable* dan mempunyai *free cash flow* yang kuat (Amici et al., 2018). Ada beberapa variabel yang mempengaruhi GPM, antara lain variabel nilai suku bunga, variabel nilai tukar, pertumbuhan biaya konstruksi, dan inflasi Aldian Syah (2018), Requena-Silvente & Walker (2007), Savitry & Padang (2019), dan Gunay et al., (2005).

Inflasi merupakan fenomena kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh beberapa faktor dalam perekonomian dari tahun ketahun. Inflasi juga merupakan deskripsi dari suatu kondisi ketika harga-harga barang tertentu

meningkat, meningkatnya harga dalam suatu negara memiliki persentase yang beragam, tidak semua komponen memiliki persentase yang sama. Kenaikan tersebut mungkin tidak naik secara bersamaan karena faktor tertentu, seperti konsumsi masyarakat yang meningkat. Kenaikan konsumsi pada produk tertentu terkadang diakibatkan oleh banyak faktor salah satunya, karena suatu momen dimana masyarakat memilih suatu produk untuk memenuhi kebutuhannya diakibatkan oleh momen tersebut. Ada beberapa peneliti yang mendukung dan tidak mendukung terkait dengan pengaruh inflasi terhadap profitabilitas dalam penelitian yang mereka lakukan.

Studi yang dilaksanakan oleh Gunay et al., (2005), kemudian diteliti kembali menggunakan unit analisis yang berbeda oleh Njeri Muiruri (2016) mengungkapkan, bahwa pengaruh yang terjadi antara inflasi dengan profitabilitas didasarkan pada *theory quantity of inflation* yang membuat bank sentral memiliki wewenang terhadap kontrol dari peredaran uang di Indonesia dan sisi inflasi dapat di kontrol dengan baik. Inflasi yang baik dapat membuat perusahaan memiliki profitabilitas yang terjaga, apabila inflasi tidak dapat dikontrol dan berada pada titik tertinggi, perusahaan akan kesulitan untuk pembelian baku, karena harganya yang tinggi. Harga yang tinggi akan menyebabkan kenaikan biaya konstruksi, kenaikan tersebut akan berdampak terhadap kenaikan harga dari kontrak. Ketika harga kontrak suatu perusahaan meningkat, pendapatan perusahaan tersebut akan terkena dampaknya. Pendapatan perusahaan yang terdampak, akan membuat *Gross*

*Profit Margin (GPM)* akan menurun. Sementara itu, pada studi terdahulu seperti yang dilaksanakan oleh Welta & Lemiyana (2017), serta Oroh et al., (2016) tidak menghasilkan temuan serupa, yaitu tidak ada pengaruh antara inflasi terhadap profitabilitas secara signifikan. Hal tersebut terjadi karena inflasi tidak mempengaruhi secara langsung profitabilitas pada suatu perusahaan, meskipun inflasi akan berdampak terhadap kenaikan biaya konstruksi pada perusahaan terkait, tetapi hal tersebut tidak menjadi faktor yang besar terhadap pendapatan. Karena, pelanggan yang telah melakukan transaksi pada suatu perusahaan dan memiliki sejarah yang panjang, enggan untuk berpindah ke perusahaan lain, disebabkan terkait faktor kepercayaan dan kualitas produk. Jadi, perusahaan dalam pandangan penelitian ini menyebutkan, bahwa peningkatan atau penurunan inflasi tidak menjadi faktor yang besar terkait dengan perubahan biaya.

Perusahaan konstruksi tidak menggunakan biaya produksi dalam pelaksanaan proyek konstruksinya, melainkan menggunakan anggaran konstruksi. Alokasi biaya untuk konstruksi antara lain biaya langsung, misalnya biaya peralatan, biaya tenaga kerja, anggaran material, juga biaya tak langsung (*overhead cost*), Dipohusodo dalam Nurdiana (2015) dalam penelitiannya.

Hasil penelitian Savitry & Padang (2019) menyebutkan bahwa, biaya konstruksi berkorelasi positif terhadap *Gross Profit Margin (GPM)* di perusahaan konstruksi. Hal ini terjadi karena, ketika biaya konstruksi bertumbuh terdapat beberapa faktor yang menyebabkannya salah satunya



adalah karena, perusahaan konstruksi dalam menjalankan usahanya membutuhkan biaya yang dikeluarkan untuk proses konstruksi dan merupakan komponen utama dalam pengerjaan proyek. Kondisi tersebut sebagaimana yang dihasilkan oleh Nurdiana (2015) dalam studinya yang menyatakan, bahwa profit merupakan komponen yang dipengaruhi oleh biaya konstruksi. Perusahaan konstruksi yang melakukan pembelian bahan baku material dari luar negeri akan berdampak terhadap komponen biaya konstruksinya yang diakibatkan oleh faktor nilai tukar.

Istilah nilai tukar rupiah juga umumnya dikenal sebagai kurs, merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh masyarakat dalam konteks bidang keuangan yang dapat didefinisikan, sebagai nilai tukar yang digunakan oleh satu negara untuk bertransaksi dengan negara lain, Mankiw dalam (Budiono & Firdayasa, 2017). Nilai tukar juga suatu istilah yang digunakan perusahaan-perusahaan, dan berfungsi untuk mencatat nilai konversi dari transaksi dengan negara luar menggunakan mata uang asing atau luar negeri ke mata uang dalam negeri atau domestik.

Jika antara mata uang asing memunculkan selisih dengan mata uang domestik, maka pada saldo laba/rugi selisih kurs pada laporan finansial yang mengakibatkan berimbas terhadap profitabilitas perusahaan. Studi yang dilaksanakan oleh (Requena-Silvente & Walker, 2007) mengungkapkan, nilai tukar rupiah berdampak terhadap kenaikan profitabilitas. Ada dua pengaruh terkait dengah hal ini, pertama apabila kurs rupiah menguat perusahaan akan diuntungkan dengan beberapa hal seperti murahnya bahan

baku yang diperoleh dari impor, bagi perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing juga diuntungkan karena biaya yang mereka keluarkan untuk tenaga kerja langsung asing juga menurun. Kedua, apabila kurs rupiah melemah perusahaan, maka perusahaan akan dirugikan, karena penurunan pendapatan.

Pendapatan perusahaan sub sektor ini menggunakan bahan baku yang mengacu pada nilai dolar Amerika Serikat, hal lain adalah pelemahan kurs rupiah dapat mempengaruhi kontrak proyek yang dalam pengerjaan, Janti Komadjaja dalam (Lalla, 2018). Penelitian Oroh et al., (2016) mengungkapkan pengaruh yang berbeda, profitabilitas perusahaan tidak dipengaruhi oleh nilai tukar. Hal tersebut terjadi karena, nilai tukar tidak memberikan pengaruh langsung pada kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Nilai tukar dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, seperti kenaikan atau penurunan penawaran dan permintaan terhadap suatu nilai mata uang, mengakibatkan pemerintah membuat kebijakan moneter. Salah satunya adalah dengan menstabilkan suku bunga BI, Perry Warjiwo dalam (Margrit & Alaydrus, 2018).

Suku bunga merupakan tingkat persentase dana atau uang yang telah disepakati dan harus diberikan oleh peminjam ke peminjam dalam periode waktu yang telah ditentukan. Suku bunga yaitu bunga yang merupakan kewajiban untuk dibayarkan pada suatu waktu tertentu yang merupakan persentase dari jumlah yang dipinjamkan (Ibrahim et al., 2019). *BI Rate* yang disebut pula sebagai *BI 7-Day*, adalah program dari kebijakan moneter

yang dibuat pemerintah untuk mengontrol inflasi. Kebijakan moneter ditentukan dan diterapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka mewujudkan juga menjaga stabilitas nilai rupiah (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*, 1999). Agar nilai rupiah selalu stabil, maka Bank Indonesia melakukan upaya pengendalian terhadap peredaran tingkat suku bunga dan jumlah uang.

Studi terdahulu yang dilakukan oleh Aldian Syah (2018) mengungkapkan, bahwa *BI Rate* memengaruhi profitabilitas perusahaan. Hal tersebut terjadi karena, ketika *BI Rate* berubah baik meningkat maupun menurun akan mempengaruhi profitabilitas dari perusahaan. Ketika, *BI Rate* meningkat biasanya bank-bank juga akan ikut meningkatkan yang dilakukan oleh bank sentral. Hal tersebut berdampak terhadap kredit macet atau biasa disebut sebagai *Non Performing Loan (NPL)* yang semakin tinggi, karena naiknya suku bunga akan dapat membuat internal perusahaan konstruksi untuk menaikkan harga kontrak mereka, untuk menutupi beban bunga yang dikeluarkan perusahaan. Ketika, suku bunga turun akan menjadi sentimen positif untuk perusahaan, menurut Ki Syahgolang dalam Soenarso (2019) menyebutkan bahwa, apabila suku bunga turun akan berpengaruh positif terhadap keuangan perusahaan khususnya laba, dengan menurunnya suku bunga acuan diharapkan bunga bank akan turun, sehingga beban bunga yang ditanggung perusahaan menjadi terkoreksi. Hasil yang berbeda terdapat pada penelitian (Hidayati, 2014) mengemukakan, bahwa *BI Rate* secara signifikan tidak memengaruhi profitabilitas perusahaan. Keadaan tersebut

terjadi, karena *BI Rate* tidak memberikan pengaruh secara langsung pada profitabilitas, diakibatkan *BI Rate* dalam pergerakannya secara garis besar dipengaruhi oleh inflasi.

Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh Welta & Lemiyana (2017) dan Njeri Muiruri (2016) untuk variabel inflasi, Budiono & Firdayasa (2017) dan Oroh et al., (2016) untuk variabel nilai tukar, Aldian Syah (2018) dan Hidayati (2014) untuk variabel suku bunga, dan satu variabel terakhir, yaitu pertumbuhan biaya konstruksi yang masih kurang di teliti terkait pengaruhnya terhadap *Gross Profit Margin* (GPM). Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Biaya Konstruksi, Nilai Tukar, dan Suku Bunga BI Terhadap *Gross Profit Margin* (GPM)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dirumuskan oleh peneliti dengan mengacu pada latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, antara lain:

1. Apakah ada pengaruh inflasi terhadap *Gross Profit Margin* (GPM).
2. Apakah ada pengaruh pertumbuhan biaya konstruksi terhadap *Gross Profit Margin* (GPM).
3. Apakah ada pengaruh nilai tukar terhadap *Gross Profit Margin* (GPM).
4. Apakah ada pengaruh suku bunga terhadap *Gross Profit Margin* (GPM).

### C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dilakukan dengan harapan dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan rumusah masalah. Penelitian ini menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap *Gross Profit Margin* (GPM).
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan biaya konstruksi terhadap *Gross Profit Margin* (GPM).
3. Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar terhadap *Gross Profit Margin* (GPM).
4. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga terhadap *Gross Profit Margin* (GPM).

### D. Kebaruan Penelitian

Penelitian memiliki kebaruan pada setiap periode, kebaruan tersebut akan menjadi dasar untuk peneliti untuk melakukan penelitian. Berikut kebaruan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

1. Terdapat variabel yang *less studied*, yaitu pertumbuhan biaya konstruksi pada perusahaan sub sektor konstruksi. Karena, realisasi dari penelitian yang ada di Indonesia terkait dengan biaya konstruksi masih minim, terlebih terhadap pengaruhnya dengan profitabilitas.
2. Unit analisis yang digunakan adalah perusahaan sub sektor konstruksi. Karena, penelitian terdahulu terkait dengan sub sektor ini diterapkan di Turki, seperti penelitian yang diteliti oleh (Emin Öcal et al., 2007).

3. Berbeda dengan penelitian sebelumnya periode yang digunakan adalah tahun 2016-2018. Karena, pada tahun tersebut *BI Rate* diganti dengan *BI 7 Day Repo Rate* sebagai hasil kebijakan pemerintah